Kesantunan Berbahasa Gubernur Maluku Utara Dalam Podcast "Curhat Bang Denny Sumargo"

Yulia Marizal
Universitas Sumatera Barat, Indonesia
E-mail: marizalyulia14@gmail.com

Article History:
Received: 01 Desember 2025
Revised: 14 Desember 2025
Accepted: 17 Desember 2025

Keywords: *bahasa, kesantunan berbahasa, pejabat publik*

Abstract: *Penelitian ini menganalisis kesantunan berbahasa Gubernur Maluku Utara dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo. Kesantunan berbahasa merupakan kunci dalam berkomunikasi. Komunikasi dapat berjalan dengan baik karena adanya kesantunan berbahasa dalam interaksi tersebut, apalagi sebagai pejabat publik. Metode penelitian ini adalah deskriptif menggunakan teknik simak dan teknik catat dengan mengidentifikasi, mentranskripsi data, mengklasifikasi, menginterpretasi data, dan menyimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya prinsip kesantunan berbahasa pada Gubernur Maluku Utara yang mencerminkan sebagai pejabat publik yang interpersonal. Hal ini dilihat dari upaya untuk menjaga keharmonisan sosial dan menekankan solusi daripada konflik dengan menggunakan bahasa argumentatif yang rasional dan empatik.*

PENDAHULUAN

Santun merupakan kultur budaya Indonesia. Apalagi saat berkomunikasi dengan lawan tutur. Kesantunan adalah perilaku yang baik hati atau etis (Zamzani, 2011). Hal ini membuat suasana saat berinteraksi tidak saling mengintimidasi sehingga menciptakan suasana yang efektif dan menyenangkan. Penutur dan lawan tutur saling menjaga kesantunan agar komunikasi mencapai tujuan. Selain itu, ketika seorang penutur dikatakan beradab, maka akan dinilai dari kesantunan berbahasa, kesopanan berbahasa, dan etika dalam berbahasa. Hal ini ditinjau agar bahasa yang digunakan dapat diterima baik oleh pendengar atau lawan tutur. Dengan kata lain, perilaku kesantunan bahawa juga berkaitan dengan norma-norma yang berlaku pada budaya dimana kontak komunikasi itu terjadi (Purnama et al., 2024).

Brown & Levinson (2020) menyampaikan bahwa kesantunan adalah strategi linguistik untuk mempertahankan wajah sosial lawan bicara, yang terdiri atas *positive face* (kebutuhan untuk dihargai) dan *negative face* (kebutuhan untuk bebas dari tekanan). Kesantunan berarti tata cara yang dipakai dan disahkan secara berkelompok hingga kesantunan menjadi persyaratan yang disahkan oleh perilaku sosial masyarakat. Kesantunan dalam tata cara berkomunikasi melalui tanda verbal atau tata cara berbahasa. Tata cara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya bahasa tersebut dalam komunikasi. Apabila tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif di dalam masyarakat tersebut.

Ketika berkomunikasi harusnya menjaga kesantunan dan perasaan lawan tutur, maka

perlunya penutur untuk memilih dan memilah penggunaan bahasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu waktu, situasi, usia, kondisi, sosial, suku, dan dimanapun bahasa digunakan (Nugroho et al., 2021). Selain itu, penutur juga memikirkan konteks pembicaraan, seperti dengan siapa berbicara, apa yang dibicarakan, bagaimana situasi pembicaraan, media apa yang digunakan, kapan waktu berbicara, dan dimana tempat berbicara (Chaer dan Agustina, dalam Suhartono & Lestariningsih, 2016). Ada beberapa prinsip kesantunan bahasa yang digunakan menurut Leech (2015), yaitu (1) maksim kearifan dengan arti buatlah kerugian orang sekecil mungkin dan buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin, (2) makim kedermawanan dengan arti buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin dan buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin, (3) maksim pujian dengan arti kecamlah orang lain sesedikit mungkin dan pujilah orang lain sebanyak mungkin, (4) maksim kerendahan hati dengan arti pujilah diri sendiri sesedikit mungkin dan kecamlah diri sendiri sebanyak mungiin, (5) maksim kesepakatan dengan arti usahakan agar ketaksepakatan antara diri sendiri dengan orang lain terjadi sedikit mungkin, dan (6) maksim kesimpatian dengan arti peserta tutur harus memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tutur.

Pada zaman sekarang, kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi akan menjadi sorotan di era milenial ini. Apalagi, sekarang ini banyak penggunaan bahasa yang bercampur dengan bahasa gaul yang dipakai oleh komunitas tertentu (Ni'am & Utomo, 2020). Hal ini juga menjadi acuan bagi masyarakat umum karena perkembangan zaman lewat media sosial akan menyebarluaskan penggunaan bahasa yang beragam. Baik itu penggunaan bahasa pejabat publik, mahasiswa, atau pun masyarakat luas. Mulianingsih (2017) mengatakan bahwa salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan mengkomunikasikan gagasan atau ide pikirannya secar jelas dan sopan kepada masyarakat atau lawan potiliknya. Bahasa politik yang santun dapat memperkuat lembaga pemerintahan karena menunjukkan keterbukaan, transparansi, dan penghargaan terhadap publik. Sebaliknya, ujaran yang provokatif, diskriminatif, atau emosional dapat menggerus kepercayaan rakyat dan menimbulkan delegitimasi politik (Habermas, 2020).

Pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting. Apalagi memegang jabatan sebagai gubernur. Gubernur adalah kepala daerah untuk wilayah Provinsi yang memiliki dua peran utama, yaitu sebagai Kepala daerah Provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan otonom dan sebagai Wakil Pemerintahan Pusat di daerah terpilih. Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden untuk urusan pemerintahan pusat yang dilimpahkan, seperti mengelola APBD, membina dan mengawasi jalannya pemerintahan di kabupaten/kota. Sekarang ini, banyak sekali yang menjadi sorotan atas terpilihnya Gubernur Maluku Utara yaitu Sherly Tjoanda Laos. Ia menggantikan suaminya yang meninggal ketika melaksanakan kampanye. Sherly Tjoanda menjadi sorotan karena menjadi salah satu gubernur di Indonesia yang memiliki kekayaan yang terbanyak. Selain itu, Sherly Tjoanda juga beberapa kali muncul di *podcast* atau berita. Salah satunya adalah *podcast Curhat Bang* bersama Denny Sumargo pada tanggal 18 November 2025. Disana ia menjelaskan beberapa permasalahan yang menjadi sorotan bagi masyarakat atas kebijakan-kebijakannya.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010, pejabat publik harus sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat. Chaer dalam Maulidi, 2015:44, mengemukakan bahwa dalam berkomunikasi sebagai salah satu kegiatan utama manusia dalam bermasyarakat dengan mencerminkan kesantunan berbahasa, kesopanan berbahasa, dan etika berbahasa. Lakoof mengatakan bahwa kesantunan berbahasa sebagai sistem hubungan interpersonal yang dirancang untuk mempermudah interaksi dengan memperkecil potensi bagi

terjadinya konflik dan konfrontasi yang selalu ada dalam pergaulan antar manusia.

Hal-hal yang mengkaji tentang kesantunan berbahasa sudah banyak diteliti, diantaranya adalah Niswasani & Juita (2019) melakukan penelitian dengan judul "Kesantunan Berbahasa Pejabat Legislatif/ Tokoh Partai Tingkat Kabupaten di Sumatera Barat dalam Media Sosial". Kemudian, Maiyola et al., (2018) melakukan penelitian dengan judul "Performa Kesantunan Berbahasa Indonesia dari Segi Penggunaan Prinsip Kesantunan Wali Kota di Sumatera Barat". Terakhir, Yusuf & Hafriana (2025) melakukan penelitian dengan judul "Analisa Kesantunan Berbahasa Anggota DPR RI terhadap Rakyat Indonesia pada Tahun 2025". Dari penelitian diatas, penulis juga merasa perlu melakukan penelitian mengenai kesantunan berbahasa Gubernur Maluku Utara dalam *podcast Curhat Bang Denny Sumargo* menjadi relevan untuk dikaji. Prinsip kesantunan berbahasa ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai bagaimana para pejabat menjaga etika berkomunikasi.

LANDASAN TEORI

Teori Kesantunan Berbahasa

Kesantunan dalam berbahasa berkaitan erat dengan konsep pragmatik, yang mencakup cara pembicara dan pendengar dalam menggunakan bahasa untuk mencapai tujuan berkomunikasi mereka (Aziz et al., 2024). Kesantunan berbahasa dipahami sebagai strategi pragmatik yang dipakai untuk memitigasi *face threatening acts* dan menegaskan relasi sosial dalam interaksi layanan. Kesantunan bukan sekedar sopan kata, tetapi bagian dari negosiasi kekuasaan dan hubungan sosial dalam percakapan nyata (Purnomo, 2025). Kesantunan berbahasa pada tindak tutur ekspresif dim media sosial dilihat dari perspektif *cyber pragmatic*, yaitu bagaimana strategi kesantunan berubah dalam interaksi digital dan bagaimana konteks digital mempengaruhi realisasinya (Fatmawati & Ningsih, 2024).

Wintarsih (2019) menyebutkan bahwa kesantunan merupakan properti atau bagian dari ujaran, tetapi bukan ujaran itu sendiri yang kemudian pendapat pendengarlah yang menentukan apakah kesantunan itu ada pada ujaran yang disampaikan. Penutur secara sadar menyadari aturan yang mengatur cara berbicara, bertindak, dan menginterpretasikan apa yang dikatakan untuk menciptakan suasan yang harmonis dan memebrikan kenyamanan satu sama lain dalam berkomunikasi (Kurniadi et al., 2018). Untuk mengetahui apakah ada kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi ini ditinjau melalui prinsip kesantunan berbahasa menurut , yaitu (1) maksim kearifan, (2) maksim kedermawanan, (3) maksim pujian, (4) maksim kesepakatan, (5) maksim kerendahan hati, dan (6) maksim kesimpatian.

Teori Pejabat Publik

Penggunaan kesantunan berbahasa sangat penting terutama bagi pejabat publik karena menjaga legitimasi dan kepercayaan publik, mencegah konflik dan misinterpretasi, meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan dan pelayanan publik, dan sebagai dasar etika komunikasi birokrasi dalam politik. Dalam interaksi sosial, kesantunan berbahasa menjadi elemen penting yang mempengaruhi kualitas hubungan antara individu, termasuk sektor pelayanan publik. Komunikasi yang efektif di sektor pelayanan publik Indonesia dapat menciptakan interaksi yang lebih positif antara masyarakat dengan pejabat publik, dimana kesantunan berbahasa berperan besar (Anwar et al., 2021).

Selain itu, Zhou et al., (2021) juga berpandangan bahwa penerapan bahasa yang sopan dalam berinteraksi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, semakin canggih perkembangan teknologi akan

mempermudah akses masyarakat dalam menjangkau perkembangan pemerintahan. Bahasa politik yang santun dapat memperkuat *legitimacy* legislatif karena menunjukkan keterbukaan, transparansi, dan penghargaan terhadap publik. Sebaliknya, ujaran yang provokatif, diskriminatif, atau emosional dapat menggerus kepercayaan rakyat dan menimbulkan delegitimasi politik (Yusuf & Hafriana, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam dalam penelitian ini adalah tuturan yang diucapkan oleh Gubernur Maluku Utara melalui video yang diunduh di media sosial *youtube.* Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak dengan teknik dokumentasi dan teknik catat. Data dikumpulkan dengan cara (1) mengunduh video di media sosial *youtube,* (2) mentranskripsi seluruh video yang telah diunduh, dan (3) mengamati dan menentukan data-data yang termasuk kesantunan berbahasa. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan langkah-langkah berikut. Mengidentifikasi dan mentranskripsi data-data, mengklasifikasikan, menginterpretasi data, dan menyimpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil transkrip data percakapan antara Sherly Tjoanda dengan Denny Sumargo dalam *podcast Curhat Bang* yang ditayangkan di *youtube* pada tanggal 18 November 2025 dengan panjang durasi 56 menit 20 detik. Menurut Leech (2015) ada enam prinsip kesantunan berbahasa, yaitu maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kesepakatan, maksim kerendahan hati, dan maksim simpati. Berdasarkan analisis percakapan antara Sherly Tjoanda dan Denny Sumargo, maka didapatkan beberapa prinsip kesantunan berbahasa yaitu sebagai berikut.

1. **Maksim Kearifan**
   a. **Bentuk tuturan 1**
      "Saya memilih untuk kasih ke sahabat-sahabat almarhum, ya sudah hal lain urus saja."
      Analisis:
      Sherly menghindari pengambilan alih peran secara sepihak dan memberikan kepercayaan kepada pihak lain, sehingga meminimalkan potensi beban sosial dan konflik. Hal ini mencerminkan upaya meminimalkan kerugian bagi orang lain dan bersifat santun secara interpersonal.
   b. **Bentuk tuturan 2**
      "Jadi saya hati-hati dalam menjawab."
      "Saya takut ketika ngomong, nanti diplintir."
      Analisis:
      Sherly secara sadar meminimalkan potensi kerugian bagi pihak lain (media, publik, institusi) dengan memilih sikap berhati-hati. Ia tidak menyerang langsung, melainkan mengungkapkan kekhawatiran secara implisit. Ini mencerminkan maksim kedermawanan dengan menghindari konfrontasi langsung.
   c. **Bentuk tuturan 3**
      "Untuk mengembalikan APBD-nya bisa berjalan tanpa mengurangoi pelayanan itu bisa dapat."
      Analisis:
      Sherly menekankan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengurangi pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Ia menghindari kesan bahwa masyarakat harus *"menanggung beban"* akibat kebijakan fiskal. Sherly juga menunjukkan kepatuhan

terhadap maksim kearifan karena berupaya menampilkan kebijakan sebagai keuntungan masyarakat bukan merugikan.

2. Maksim Kedermawanan

a. Bentuk tuturan 1

"Saya memilih untuk tidak mau tahu, saya tidak mau mikir sampai ke situ."

Analisis:

Sherly secara implisit mengorbankan posisi kontrol dan otoritasnya untuk menjaga stabilitas emosional dirinya dan pihak lain. Ini menunjukkan penggurangan kepentingan diri dalam konteks sosial yang lebih luas, selaras dengan maksim kedermawanan.

b. Bentuk tuturan 2

"Semua bisa saya kembalikan lagi dengan efisiensi perjalanan dinas.."

Analisis:

Sherly menonjlkan bahwa efisiensi dilakukan pada perjalanan dinas (aparatur/ pemerintah), bukan pada layanan publik. Ini menunjukkan pengorbanan dari pihak internal pemerintahan, bukan dari masyarakat. Tuturan ini memperlihatkan kedermawanan simbolik karena beban kebijakan diarahkan ke dirinya/instansi, bukan ke publik.

c. Bentuk tuturan 3

"Saya keluar dari semua pengurusan perusahaan."

"Saya tidak terlibat sama sekali dengan operasional."

Analisis:

Sherly menekankan pengorbanan posisi dan kendali ekonomi demi kepentingan publik. Dengan mengurangi keuntungan pribadi (tidak menjadi pengurus), penutur mematuhi maksim kedermawanan karena memaksimalkan beban pada diri sendiri dan meminimalkan potensi kerugian publik.

3. Maksim Pujian

a. Bentuk tuturan 1

"Jadi, jalan jembatannya dapat, pendidikan kesehatan gratisnya dapat."

Analisis:

Alih-alih menyalahkan pihak tertentu (misalnya pusat atau surat edaran Menkeu), Sherly memilih menekankan hasil positif dan keberhasilan kebijakan. Ia menghindari kritikan langsung, sehingga menjaga keharmonisan relasi kelembagaan. Hal ini sejalan dengan maksim pujian.

b. Bentuk tuturan 2

"Mereka kepraktik sih." (tentang CSR perusahaan tambang)

"Sebagian besar masyarakat memilih ada tambang."

Analisis:

Sherly tidak serta merta menyalahkan perusahaan atau pihak lain. Bahkan ketika ada kerusakan lingkungan, ia menggunakan bahasa netral dan solutif. Kritik disampaikan secara tidak konfrontatif, sehingga tetap menjaga muka pihak lain.

c. Bentuk tuturan 3

"Ini tanpa mereka sengaja, daripada kita menyalahkan, kita mencari solusi."

Analisis:

Sherly tidak mencela perusahaan tambang secara personal, namun disam[paikan secara

struktural, bukan menyerang individu. Artinya, dalam konteks kekuasaan ia tidak memicu konflik terbuka antara perusahaan dengan masyarakat.

4. Maksim Kesepakatan

a. Bentuk tuturan 1

"Saya seharusnya menjawab."
"Akhirnya saya belajar."
Analisis:
Sherly menunjukkan pengakuan tanggung jawab dan kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. Hal ini mengurangi potensi ketidaksepakatan dan menegaskan sikap kooperatif, sesuai dengan maksim kesepakatan.

b. Bentuk tuturan 2

"Saya dari awal transparan."
"Berdasarkan hasil penjelasam dalam aturan perundangan yang berlaku di Indonesia."
Analisis:
Sherly menautkan pernyataannya dengan otoritas hukum dan institusi negara (KPK, Kejaksaan Agung, BPK, peraturan perundang-undangan). Ini merupakan strategi untuk memaksimalkan kesepakatan sosial dan mengurangi potensi perbedaan pendapat dengan publik.

c. Bentuk tuturan 3

"Nah itu itu semua bisa saya kembalikan lagi.."
Respons lawan tutur:
"Pantes ibu cukup vokal kemarin ya?"
Analisis:
Tuturan Sherly membuka ruang persetujuan, yang kemudian ditanggapi dengan penguatan dan pengakuan dari lawan tutur. Ini menunjukkan keberhasilan strategi kesantunan yang mengarah pada kesepakatan dan penerimaan.

5. Maksim Kerendahan Hati

a. Bentuk tuturan 1

"Karena mungkin dari luar kelihatannya saya bisa meng-handle semua, tapi tidak sesederhana itu juga. Tetap manusia."
Analisis:
Sherly merendahkan diri dengan menolak anggapan bahwa dirinya mampu mengendalikan semuanya. Ia menekankan keterbatasan sebagai manusia biasa. Hal ini menunjukkan kepatuhan pada maksism kerendahan hati karena Sherly meminimalkan pujian terhadap diri sendiri.

b. Bentuk tuturan 2

"Dan harus jadi ibu, bapak, pejabat publik. Itu kadang-kadang nangis sendiri ya."
Analisis:
Sherly menampilkan kerentanan emosional dan menghindari citra superior sebagai pejabat publik. Ia tidak menonjolkan kekuasaan atau keistimewaan, melainkan menegaskan posisi sebagai manusia biasa. Hal ini menunjukkan kepatuhan pada maksim kerendahan hati dengan meminimalkan pujian terhadap diri sendri.

c. Bentuk tuturan 3

"Nah, itu kan harus buka itu APBD satu-satu. Harus baca satu-satu."

Analisis:
Sherly menunjukkan kerja keras dan kompetensinya, tetapi disampaikan secara prosedural, bukan membanggakan diri secara eksplisit. Dengan fokus pada proses administratif, Sherly masih relatif patuh pada maksim kerendahan hati, meskipun terdapat implikatur kompetensi personal.

6. Maksim Kesimpatian

a. Bentuk tuturan 1

"Setiap kali saya meng-handlenya sendiri, membuat saya semalin sadar bahwa saya itu sendiri sekarang."

Analisis:
Sherly mengekspresikan kondisi emosional yang rentan tanpa menyalhkan pihak lain. Tuturan ini memicu empati dari lawan tutur dan pendengar, sehingga memenuhi maksim kesimpatian dengan memaksimalkan rasa simpati dan kedekatan emosional.

b. Bentuk tuturan 2

"Kadang-kadang nangis sendiri."
"Ini kayaknya bikin mental breakdown juga."

Analisis:
Sherly membuka ruang simpati dengan mengungkapkan tekanan psikologis secara jujur tanpa menyalahkan pihak lain. Strategi ini memaksimalkan rasa simpati pendengar, sehingga kesantunan diwujudkan memalui kedekatan emosional, bukan dominasi wacana.

c. Bentuk tuturan 3

"Artinya saya nggak punya uang untuk infrastruktur."

Analisis:
Sherly menyampaikan bukan untuk mengeluh, tetapi untuk mengajak

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis prinsip kesantunan berbahasa menurut pandangan (Leech, 2015), tuturan Sherly Tjoanda menunjukkan kesantunan berbahasa yang tinggi melalui kepatuhan pada enam prinsip kesantunan berbahasa. Tuturan tersebut mencerminkan, upaya penutur untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari ancaman terhadap muka lawan tutur, meskipun berada dalam kondisi emosional yang berat. Dalam tuturannya, Sherly Tjoanda juga berorientasi untuk kepentingan publik dengan menghindari menyalahkan pihak lain secara eksplisit, kemudian menekankan solusi bukan konflik dengan menggunakan bahasa argumentatif yang rasional dan empatik. Sherly juga menunjukkan keahliannya dalam berbahasa dengan tenang dan santai serta mengungkapkan berdasarkan fakta-fakta yang telah ia temukan. Jadi, dalam penyampaian bahasa ia tidak ragu-ragu lagi dalam bertutur.

DAFTAR REFERENSI

Anwar, M., Murtadho, F., Boeriswati, E., Yarmi, G., & Rosa, H. T. (2021). The Analysis Model of Impolite Indonesian Language Use. *Linguistics and Culture Review*, *5*(S3), 1426–1441.

Aziz, Z. M., Anwar, M., & Murtadho, F. (2024). Creating Public Services Based On Language Politeness: An Analysis of Effective Indonesian Language. *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, *8*(3), 356–367.

Brown, P., & Levinson. (2020). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. University Press.

Fatmawati, F., & Ningsih, R. (2024). Politeness in Expressive Speech Acts: A Cyber Pragmatics Approach. *JOLLT Journal of Languages and Language Teaching*, *12*(4), 1721–1738.

Habermas, J. (2020). *The Theory of Communicative Action*. Polity Press.

Kurniadi, F., Hilaliyah, H., & Hapsari, S. N. (2018). Membangun Karakter Peserta Didik Melalui Kesantunan Berbahasa. *Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 1–7.

Leech, G. (2015). *Prinsip-Prinsip Pragmatik. Ter. dari The Principles of Pragmatics oleh M. D. D. Oka.* Jakarta: UI Press.

Maiyola, O., Ermanto, E., & Agustina, A. (2018). Performa Kesantunan berbahasa Indonesia dari Segi Penggunaan Prinsip Kesantunan Wali Kota di Sumatera Barat. *Bahasa Dan Sastra*, *5*(2), 75–84.

Mulianingsih, S. (2017). Wujud Pragmatik Deklaratif Pejabat Publik Dalam Tinjauan Fungsi Bahasa (Studi Kasus Penggunaan Bahasa Calon Walikota Bandung Tahun 2013). *TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan)*, *9*(1), 78–89.

Ni'am, S. T. F., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis Pematuhan dan Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa pada Kegiatan Praktik Debat Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Pecangaan. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, *9*(2), 116–122.

Niswasani, N., & Juita, N. (2019). Kesantunan Berbahasa Pejabat Legislatif/Tokoh Partai Tingkat Kabupaten di Sumatra Barat dalam Media Sosial. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, *6*(4), 577–589.

Nugroho, R., Wardiani, R., & Setiawan, H. (2021). Kesantunan Berbahasa dalam Percakapan Antarmahasiswa Semester Delapan STKIP PGRI Ponorogo. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, *8*(1), 37–43.

Purnama, I., Malik, A., Testy, F., Elfitra, L., & Irawan, D. (2024). Prinsip Kesantunan Berbahasa di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, *13*(1), 23–32.

Purnomo, B. (2025). A Pragmatic Study of (Im) Politeness Strategies and Institutional Power in Indonesian Hotel Telephone Conversations. *J-LELC: Journal of Language Education, Linguistics, and Culture*, *5*(3), 282–291.

Suhartono, S., & Lestariningsih, E. D. (2016). Etika Berbahasa dalam Pelayanan Publik. *Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, Dan Budaya*, *6*(2), 164–175.

Wintarsih, S. P. (2019). Pentingnya Kesantunan Berbahasa bagi Mahasiswa. *Metamorfosis|Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia Dan Pengajarannya*, *12*(1), 61–64.

Yusuf, N., & Hafriana, N. (2025). Analisa Kesantunan Berbahasa Anggota DPR RI Terhadap Rakyat Indonesia pada Tahun 2025. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(6), 2457–2466.

Zamzani, Z. (2011). Pengembangan Alat Ukur Kesantunan Bahasa Indonesia dalam Interaksi Sosial Bersemuka. *LITERA*, *10*(1), 1–10.

Zhou, X., Chen, S., Chen, L., & Li, L. (2021). Social Class Identity, Public Service Satisfaction, and Happiness of Residents:The Mediating Role of Social Trust. *Frontiers in Psychology*, *12*(1), 659657.